



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : CHRISTINA SHANDRA TOBONDO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 486893

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.572.542.000**

1. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/147 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 146.381.000
4. Tanah Seluas 591 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 91.605.000
5. Tanah Seluas 593 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 91.915.000
6. Tanah Seluas 1609 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 249.395.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 526 m2/402 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 436.046.000
8. Tanah Seluas 321 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 64.200.000
9. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/264 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 223.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 128.500.000**



1. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI  
Rp. 120.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC SCOOTER Tahun 2010, HASIL  
SENDIRI Rp. 8.000.000

<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	12.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	1.713.042.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	1.713.042.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.